

Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada RSUD I.A. Moeis Samarinda

Wahyu Sri Handayani¹, Catur Kumala Dewi², Rina Masithoh Haryadi³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : srihandayaniayu88@gmail.com

Keywords :

Asset Inventory, Asset Legal Audit, Asset Valuation, Optimizing The Management of Regional Property.

ABSTRACT

Regional property is an important element in the administration of government and services to the community. Asset optimization is part of the asset management process with the aim of maximizing the potential utilization of assets by inventorying and valuing assets with a legal audit process to reduce the level of risk in legal issues.

The purpose of this study was to determine the influence of inventory, legal audit, and asset valuation on optimizing regional property management at IA Moeis Hospital Samarinda.

This research method consists of several elements, namely data collection techniques and details of the data needed. The data in this study were obtained by distributing questionnaires to 38 samples using the saturated sample method. The analysis technique used in this study is smart PLS. The results of the study show that asset inventory, asset legal audit and asset valuation affect the optimization of regional property management at RSUD I.A. Moeis Samarinda.

PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah pusat pelayanan kesehatan yang sangat penting bagi masyarakat yaitu memberikan sebuah pelayanan dalam hal ini pelayanan kesehatan dan harus berdasarkan pada pendekatan kesehatan serta dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah sakit juga dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kualitas pelayanan rumah sakit dapat berpengaruh pada citra rumah sakit tersebut. Penanganan manajemen aset penting bagi keberhasilan suatu instansi. Penanganan atau pengelolaan bukan dilihat dari aktivitas politisnya saja, tetapi ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam penanganan barang milik daerah, seperti pengelolaan barang yang tertib, terbuka dan akuntabel, serta mengedepankan azas-azas pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam melakukan pengelolaan barang.

Pengelolaan barang yang tertib dapat dilakukan dengan menginventarisasi aset berdasarkan data dari buku inventaris. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. Barang yang dimiliki oleh pemerintah yang berfungsi

sebagai operasional untuk pelayanan terhadap masyarakat dengan masa manfaat dan kondisi yang masih bisa di fungsikan Barang (Aset) sering disebut Barang Milik Daerah (BMD). Menurut Siregar (2020:518) Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.

Proses keberhasilan instansi pemerintah dipengaruhi oleh pengadaan barang / jasa pemerintah. Pengadaan barang / jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang / jasa. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik. System pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi menghasilkan kinerja proyek yang buruk, dan menunda manfaat proyek bagi pemerintah maupun masyarakat. Ketidakterbacaan sistem pengadaan juga membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan sehingga diperlukan adanya legal audit aset. Menurut Siregar (2020:519) menyatakan bahwa Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset.

Permasalahan legal sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor dan lain-lain. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah Legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitikberatkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan secara administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain. Dalam manajemen aset baik negara, daerah maupun swasta, penilaian aset adalah tahapan yang memegang peranan penting, karena tanpa adanya penilaian aset, maka aset tersebut kurang dapat dimanfaatkan dengan baik. Aset dapat dimanfaatkan dengan baik apabila nilai ekonomis dari aset dapat ditentukan nilainya, hal ini dilakukan untuk mengetahui potensi harta kekayaan dari suatu negara.

Umumnya penilaian digunakan instansi keuangan dalam menilai sebuah aset. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah, Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. Menurut Siregar (2020:519) menyatakan bahwa Penilaian aset adalah satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen dalam pemerintahan tim penilai dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penerapan harga bagi aset yang ingin dijual.

Aset yang memiliki potensi yang dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Menurut Siregar (2018: 519) optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. menentukan sektor-sektor unggulan tersebut harus terukur dan transparan.

Menurut Siregar (2018: 497) Aset daerah yang belum dimanfaatkan dapat didayagunakan secara optimal, dengan tujuan :

- a. Agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya biaya dikaitkan dengan segi penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab.
- b. Jika barang daerah tersebut dimanfaatkan secara optimal akan dapat meningkatkan atau menciptakan sumber pendapatasn asli daerah (PAD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 ayat 16 Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka penting untuk memaksimalkan pengelolaan aset atau barang milik daerah (BMD) menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, penilaian tuntutan ganti rugi agar Barang Milik Daerah mampu memberikan kontribusi yang maksimal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah pasal 2 :

- 1) Barang Milik Daerah, meliputi :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 2) Barang sebagaimana yang dimaksud pada huruf (1) point b meliputi :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Awal berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah I.A. Moeis Samarinda pada tahun 2007 hanya memiliki Barang Milik Daerah berupa satu bangsal umum. Semakin lama banyaknya pengadaan sehingga banyak pula bmd yang dimiliki rumah sakit. Kondisi dimana terjadinya barang pengadaan baik dari APBD / APBN tanpa adanya permintaan, adanya permintaan tetapi barang tidak diadakan, adanya pengadaan barang dengan spesifikasi barang yang berbeda dengan permintaan baik dalam jumlah maupun merk atau type, penggunaan barang baru tetapi sudah rusak padahal belum 1 tahun, barang

baru tetapi sudah tidak dapat digunakan karena speknya tidak sesuai penggunaan, memindahkan barang tanpa melapor pengurus barang, fenomena tersebut terjadi sejak 2011 hingga sekarang sehingga diperlukan penertiban untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) menggunakan langkah-langkah variable sebagai berikut inventarisasi, legal audit, penilaian terhadap optimalisasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah pada RSUD I.A. Moeis Samarinda. Penelitian ini menggunakan alat analisis smart PLS. Berdasarkan uraian latar belakang diatas bahwa penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada RSUD I.A. Moeis Samarinda”**.

METODE

Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di RSUD I.A. Moeis Samarinda.

Variabel penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel bebas. Adapun variabel independen sendiri terdiri dari :

1. Inventarisasi Aset (X1)
2. Legal Audit Aset (X2)
3. Penilaian Aset (X3)

Variabel terkaitnya adalah Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Y) diukur dengan indikator :

- a. Mengetahui standarisasi pengelolaan sarana dan prasarana kerja
- b. Menetapkan kebutuhan barang sesuai keperluan
- c. Menetapkan kebutuhan barang sesuai mutu dan jumlah
- d. Mengetahui pengelolaan aset dalam database khusus aset

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field work research*) yaitu langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data peneliti menyebarkan kuesioner. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2019:126). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan RSUD I.A. Moeis Samarinda.

Sampel pada penelitian ini adalah pegawai yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah di RSUD I.A. Moeis Samarinda yang berjumlah sebanyak 38 pegawai. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel jenuh. Istilah lain dari sampling jenuh adalah sensus, dimana pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang berhubungan langsung dengan pengelolaan barang milik daerah di RSUD I.A. Moeis Samarinda.

Alat Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah smart PLS.

1. Reliabilitas indikator bertujuan untuk menilai apakah indicator pengukuran variable laten reliable atau tidak. Caranya dengan mengevaluasi hasil outer loading tiap indicator. Nilai loading di atas 0,7 menunjukkan bahwa konstruk dapat menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya. (Wong K.K., 2013 dan Sarstedt dkk, 2017)
2. *Internal Consistency Reliability* mengukur seberapa mampu indicator dapat mengukur konstruk latennya. Alat yang digunakan untuk menilai hal ini adalah *composite reliability* dan Cronbach's alpha. Nilai *composite reliability* 0,6-0,7 dianggap memiliki reliabilitas yang baik (Sarstedt dkk, 2017).
3. Validitas konvergen ditetntukan berdasarkan dari prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas konvergen sebuah konstruk dengan indicator reflektif dievaluasi dengan Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE seharusnya sama dengan 0,5 atau lebih. Nilai AVE 0,5 atau lebih berarti konstruk dapat menjelaskan 50% atau lebih varian itemnya. (Wong K.K., 2013 dan Sarstedt dkk, 2017)
4. Validitas diskriminan bertujuan untuk menentukan apakah suatu indicator reflektif benar merupakan pengukur yang baik bagi konstruknya berdasarkan prinsip bahwa setiap indicator yang harus berkorelasi tinggi terhadap konstruknya saja. Pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. (Ghozali dan Latan, 2015).
5. Koefisien determinasi (R²) merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai koefisien determinasi (R²) diharapkan antara 0 dan 1. Nilai R² 0,75, 0,50, dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, moderat, dan lemah. Chin memnerikan kriteria nilai R² sebesar 0,67, 0,33 DAN 0,19 sebagai kuat, moderat, dan lemah (Ghozali dan Latan, 2015).

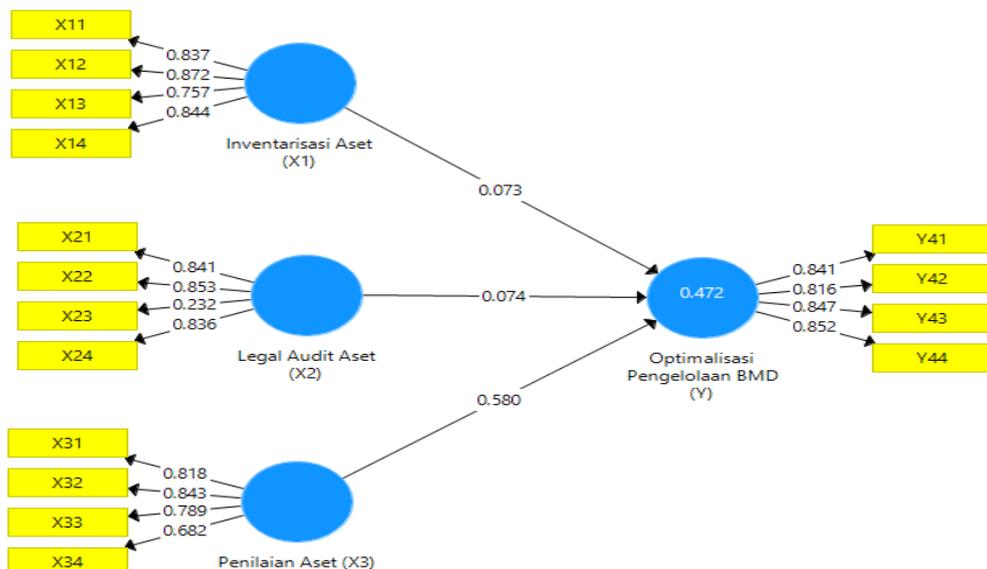
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

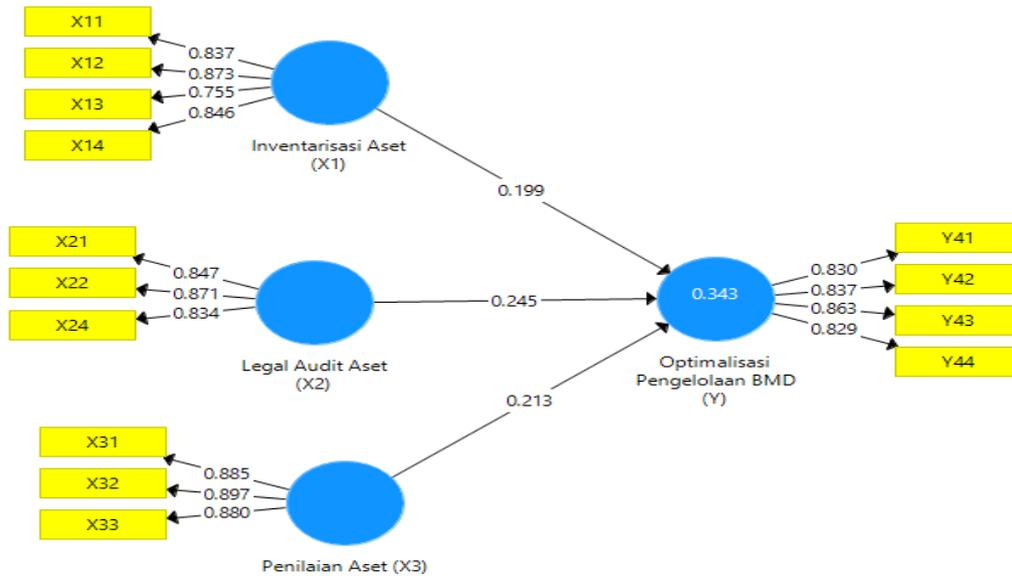
Evaluasi model pengukurannya diuji dengan beberapa indikator antara lain: Validitas Konvergen, Validitas Diskriminan, dan Reliabilitas.

a. Validitas Konvergen



Gambar 1.1 Indikator sebagai Pengukur Variabel Laten
Sumber : Data diolah Peneliti, 2023

Pada gambar 1.1, ada indikator yang dihilangkan atau dieliminasi dari model structural yaitu X23 dan X34 karena nilainya dibawah dari 0,7 sehingga dikatakan tidak valid. Hanya indikator yang valid saja yang dipakai setelah melalui uji validitas konvergen.



Gambar 1.2 Indikator Valid sebagai Pengukur Variabel Laten
Sumber : Data diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan pada gambar 1.2, dikatakan semua indikator valid setelah melalui uji validitas konvergen.

b. Validitas Diskriminan

Tabel 1 Hasil Pengujian Cross Loading

	Inventarisasi Aset (X1)	Legal Audit Aset (X2)	Penilaian Aset (X3)	Optimalisasi Pengelolaan BMD (Y)
X11	0,837			
X12	0,873			
X13	0,755			
X14	0,846			
X21		0,847		
X22		0,871		
X24		0,834		
X31			0,885	
X32			0,897	
X33			0,880	
Y41				0,830

Y42				0,837
Y43				0,863
Y44				0,829

Sumber : Hasil Output Smart PLS, 2023

Berdasarkan pada tabel 1 nilai *cross loading* pada masing-masing item memiliki nilai >0.7 , dan juga pada masing-masing item memiliki nilai paling besar saat dihubungkan dengan variabel latennya dibandingkan dengan ketika dihubungkan dengan variabel laten lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel manifest dalam penelitian ini telah tepat menjelaskan variabel latennya dan membuktikan bahwa *discriminant validity* seluruh item valid.

c. Uji Reliabilitas

Tabel 2 nilai *Cronbach alpha* dan *Composite reliability* :

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Inventarisasi Aset (X1)	0,847	0,853	0,897	0,687
Legal Audit Aset (X2)	0,811	0,815	0,887	0,724
Penilaian Aset (X3)	0,868	0,896	0,918	0,788
Optimalisasi Pengelolaan BMD (Y)	0,861	0,861	0,905	0,705

Sumber : Hasil Output Smart PLS, 2023

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *composite reliability* semua variabel penelitian $> 0,7$ dan *Cronbach Alpha* $> 0,6$. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *composite reliability* dan *cronbach alpha* sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat realibilitas yang tinggi.

2. Hasil Evaluasi Inner Model

Tabel 3 hasil perkiraan *R-square* dengan menggunakan PLS.

	R Square	R Square Adjusted
Optimalisasi Pengelolaan BMD (Y)	0,343	0,285

Sumber : Hasil output smart PLS, 2023

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan nilai adjusted *R-Square* dari variabel Optimalisasi Pengelolaan BMD sebesar 0,285, nilai tersebut artinya bahwa variabel optimalisasi pengelolaan BMD dapat dijelaskan dengan variabel Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, dan Penilaian Aset sebesar 28,5% dan sisanya 71,5% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Inventarisasi Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel inventarisasi aset pada indikator dilakukan pembukuan sesuai dengan asal aset, volume/jumlah, merk, tipe dan data lainnya tidak cukup mampu memberikan pengaruh yang mendominasi terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Hal ini berarti karyawan RSUD I.A. Moeis memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD).

Hasil analisis ini sejalan dengan keadaan di RSUD IA Moeis Samarinda bahwasanya sudah dilakukan pencatatan aset melalui KIR (Kartu Inventaris Ruangan) dan BI (Buku Inventaris) untuk mengetahui aset tetapi tidak cukup mampu memberikan pengaruh optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

2. Pengaruh Legal Audit Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel legal audit aset pada indikator dilakukan Aktivitas legal audit dilakukan oleh bagian khusus untuk menangani masalah legal audit aset tidak cukup mampu memberikan pengaruh yang mendominasi terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Hal ini berarti karyawan RSUD I.A. Moeis memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD).

Hasil analisis ini sejalan dengan keadaan di RSUD IA Moeis Samarinda bahwasanya sudah dilakukan legal audit aset secara internal oleh tim aset maupun external oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk mengetahui kejelasan aset secara hukum tetapi tidak cukup mampu memberikan pengaruh optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

3. Pengaruh Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel penilaian aset pada indikator Mengetahui jumlah aset yang dimiliki tidak cukup mampu memberikan pengaruh yang mendominasi terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Hal ini berarti karyawan RSUD I.A. Moeis memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD).

Hasil analisis ini sejalan dengan keadaan di RSUD IA Moeis Samarinda bahwasanya sudah dilakukan pengetahuan jumlah aset melalui aplikasi PASTI (Pencatatan Aset Terintegrasi) untuk mengetahui kejelasan jumlah dan kondisi aset tetapi tidak cukup mampu memberikan pengaruh optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Inventarisasi aset memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah pada RSUD I.A. Moeis Samarinda, semakin tinggi factor inventarisasi aset tidak cukup mampu meningkatkan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.
2. Legal audit aset memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah pada RSUD I.A. Moeis Samarinda, semakin tinggi legal audit aset tidak cukup mampu meningkatkan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

3. Penilaian aset memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah pada RSUD I.A. Moeis Samarinda, semakin tinggi penilaian aset tidak cukup mampu meningkatkan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

2. Saran

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti kemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Bagi RSUD I.A. Moeis untuk dapat meningkatkan inventarisasi aset, legal audit aset dan penilaian aset demi mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah (BMD).
2. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih untuk variable lain yang dapat mempengaruhi optimalisasi aset sehingga berbeda apabila dilakukan penelitian yang lain. Variable lain yang diprediksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset antara lain perencanaan kebutuhan, pemeliharaan, pengamanan, pengawasan serta pengendalian aset.

REFERENCES

- Ghozali I. dan Latan H. 2015. *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0. Ed. Ke-2* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyani, Indah Dewi dan Ari Kristiana. 2020. "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes"
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang *Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*
- Sarstedt M, Ringle C.M dan Hair J.F. 2017. *Partial Least Square Structural Equation Modeling. Dalam : Homburg C., Klarmann M., Vomberg A (eds) Handbook of Marketing Research. Springer, Cham*
- Siregar, Doli D. 2020. *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi Kedua. Cetakan Kesatu. Bandung: CV Alfabeta, ISBN: 978-602-289-533-6.
- Wong K.K 2013. *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS Sem) Techniques Using SmartPLS. Marketing Bulletin. Vol 21: Technical Note 1.*